

**KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS  
INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**TESIS**

**Oleh :**

**ARMEL YENTIFA**

**082120007**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2010**

## KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

ARMEL YENTIFA

0821220007

(Dibawah Bimbingan Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak dan Suhanda, SE, M.Si, Ak)

### RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui kesesuaian aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan investor dan kreditor. Populasi dalam penelitian ini adalah investor dan kreditor sebagai salah satu kelompok pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan kategori menengah dan besar yang mewakili investor dan pimpinan bank nasional yang terdapat di Sumatera Barat yang mewakili kreditor. Kuesioner disebarakan baik secara personal maupun melalui email.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik deskriptif dengan menggunakan formula Riduwan (2008). Perbandingan antara aturan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan kebutuhan pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Sebagai analisis tambahan pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan responden terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah digunakan uji *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA).

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa informasi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dibandingkan dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah yang ada di Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, ternyata aturan pelaporan keuangan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan responden. Sementara itu, hasil MANOVA menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan responden atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata-kata kunci:** kebutuhan informasi investor dan kreditor, pelaporan keuangan pemerintah daerah

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan *good government governance* di Indonesia adalah dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KKSAP, 2005). Sedangkan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KKSAP, 2005).

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk pelaporan keuangan, dimana kita dapat melihat segala yang terjadi di dalam entitas tersebut, yaitu pemerintahan. Melalui pelaporan keuangan pemerintah, berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri dapat menggunakan informasi yang terkandung didalamnya untuk pengambilan keputusan. Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al. (2002) dalam Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan pemerintah yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan). Hal yang senada juga dinyatakan dalam SAP (2005) paragraf 10, bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang

berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Tetapi berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan ternyata informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintah tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Di Swedia para politisi dan manajer senior pemerintahan tidak menggunakan informasi akuntansi akrual yang disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintahnya (Paulsson, 2006). Sementara itu, di Italia para pengguna juga belum memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya (Steccolini, 2002). Demikian juga dengan di Indonesia, kepala SKPD tidak memanfaatkan secara optimal informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Fontanella, 2010).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Hasil penelitian di Swedia menunjukkan bahwa pengguna tidak memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah karena beban kerja yang berat dan ketidakpahaman mereka atas informasi akuntansi akrual yang tersedia (Paulsson, 2006). Steccolini juga menemukan bahwa para pengguna tidak memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Daniels and Daniels (1991) menyimpulkan bahwa informasi yang berisi pelaporan keuangan *municipal* tidak cukup untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu *municipality*. Hasil penelitian Yuliari (2003) juga menyimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban pemerintah berupa Nota Perhitungan Anggaran Negara (PAN) tidak sesuai kebutuhan *stakeholder* pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Di Indonesia pengguna belum memanfaatkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah antara lain disebabkan oleh lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman SDM pemerintahan terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri (Hapsari, 2008). Sementara Martiningsih (2008) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi masyarakat sebagai salah satu pengguna pelaporan keuangan pemerintah. Senada dengan Martiningsih, Fontanella (2010) juga menyatakan tingkat pendidikan, latar

**BAB V**  
**KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN**  
**DAN IMPLIKASI PENELITIAN**

**5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini mengidentifikasi jenis informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor. Di dalam penelitian ini juga dilihat kesesuaian kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah yaitu PP No. 24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006. Kesimpulan yang merupakan inti dari analisis dan pengujian data dapat dijelaskan berikut ini:

1. Investor dan kreditor membutuhkan informasi kondisi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Aturan pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor.
3. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

**5.2 Saran**

Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang belum diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan atau Permendagri No. 13 tahun 2006, serta rekomendasi jenis laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu:

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2004. *Accounting Theory*, 5<sup>th</sup> edition. United States: Thomson Learning
- BPPS, 2005, Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2000-2005.
- BPPS, 2007, Direktori Perusahaan Tahun 2006
- Daniels, Janet D. and Daniels, Craig E. 1991. Municipal Financial Reports: What Users Want. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 10 Issue 1 pp 15-38.
- Firmansyah, Dadang, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Periode Tahun 1985 – 2004, Skripsi, UII, Jogjakarta
- Fontanella, Amy, 2010, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Dalam Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis, Universitas Andalas, Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005*, Yogyakarta: BPFE
- Governmental Accounting Standard Board. 1998. *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Com.
- Gozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivarite dengan Variabel SPSS, cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Andhisa Setya. 2008. Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Teori Akuntansi. Edisi Revisi Cetakan keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- International Federation of Accountants. 1991. Public Sector Committee Study Nomor 1. *Financial Reporting by National Governments*.
- International Federation of Accountants. 2000. Public Sector Committee Study Nomor 11. *Government Financial Reporting*.
- International Public Sector Accounting Standards Board. International Public Sector Accounting Standard 1 *Presentation of Financial Statements*. Issued